

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dengan meneliti peranan dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, secara umum implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak sudah berjalan dengan efektif.

Implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan baik meskipun pada tahun pertama Program Sekolah Penggerak tersebut banyak mengalami hambatan dalam pengimplementasiannya, pada tahun kedua dan tahun ketiga implementasi Program Sekolah Penggerak semakin berjalan dengan lancar. Adapun aspek yang perlu ditingkatkan lagi adalah aspek sumber daya terutama dalam sumber daya anggaran. Agar lebih jelas maka dapat disimpulkan implementasi Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung sebagai berikut.

5.1.1 Komunikasi

Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara BBPMP, Dinas Pendidikan, dan sekolah. Rumah PMO di BPPMP menampung dan menyalurkan informasi tentang Program Sekolah Penggerak ke pemerintah daerah. Dinas Pendidikan berperan sebagai jembatan penghubung antara BBPMP dengan sekolah. Upaya untuk sosialisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara daring, luring, dan blended melalui channel Youtube, laman resmi, group media sosial, dan rapat-rapat. Pelaksanaan kebijakan ini diawali dengan sosialisasi kebijakan, penetapan provinsi/kabupaten/kota penyelenggara Program Sekolah Penggerak, seleksi sepala satuan pendidikan, dan penetapan Sekolah Penggerak. Kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan Program Sekolah

Dea Elisa, 2023

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penggerak ini telah dipahami oleh seluruh warga Sekolah Penggerak. Komunikasi terus dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan baik oleh FSP secara luring dan daring sehingga hal tersebut menjadi bukti konsistensi dari pelaksana kebijakan. Komunikasi pada tahun pertama implementasi Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung mengalami beberapa kendala seperti jangka waktu yang pendek untuk mensosialisasikan program tersebut serta informasi yang belum lengkap. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di tahun kedua dan ketiga semakin berjalan lancar.

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia untuk Program Sekolah Penggerak ini terdiri dari PMO tingkat pusat, PMO tingkat daerah, PMO tingkat sekolah, dan Fasilitator Sekolah Penggerak. PMO tingkat sekolah dan warga sekolah menjadi SDM yang menentukan keberhasilan implementasi Program Sekolah Penggerak. SDM yang ditempatkan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak ini sudah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya. Sumber daya finansial sekolah berasal dari BOS Kinerja dan dukungan berupa bantuan fasilitas IT dari pemerintah daerah. Fasilitas untuk implementasi Program Sekolah Penggerak ini tidak jauh berbeda dengan fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki sekolah hanya saja ada penambahan alat-alat IT. Akses terhadap informasi mengenai Program Sekolah Penggerak juga mudah didapatkan. Meskipun terdapat kendala dalam dimensi sumber daya ini seperti adaptasi pada perubahan, tuntutan kompetensi digital guru, dan beberapa kendala teknis yang menghambat implementasi Program Sekolah Penggerak di Kota Bandung terutama di tahun pertama. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi dengan intervensi yang terus menerus diberikan pada sekolah sehingga sumber daya untuk implementasi Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung ini sudah sesuai dengan kebutuhan.

5.1.3 Disposisi

Respon pelaksana kebijakan pada kebijakan Program Sekolah Penggerak ini sangat baik dan positif. Hal tersebut tampak pada komitmen dari BBPMP Provinsi Jawa Barat yang memastikan Program Sekolah Penggerak ini berjalan dengan lancar. Dinas Pendidikan Kota Bandung berkomitmen untuk mengimbau seluruh

sekolah di Kota Bandung untuk menjadi Sekolah Penggerak dan konsisten dalam mendampingi Sekolah Penggerak. Sekolah juga berkomitmen untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak dengan terus mengimbaskan praktik-praktik baik, menjaga integritas, dan meningkatkan motivasi guru. SDM pelaksana kebijakan juga telah diatur sesuai dengan keahlian dan perannya masing-masing. Tidak ada insentif selain bagi Fasilitator Sekolah Penggerak untuk SDM di sekolah dalam melaksanakan kebijakan Program Sekolah Penggerak, melainkan bentuknya berupa reward atau apresiasi saja. Adapun beberapa kendala dalam disposisi implementasi Program Sekolah Penggerak ini adalah perbedaan dan perubahan *mindset* pelaksana kebijakan, tetapi dengan hasil dari Program Sekolah Penggerak yang sudah mulai dapat dirasakan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa, mereka semakin mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak ini

5.1.4 Struktur Birokrasi

Terdapat tiga tingkatan PMO dalam Program Sekolah Penggerak. Pertama adalah PMO tingkat pusat yang terdiri dari Mendikbud Ristek, Sekretaris Jenderal, Dirjen PAUDDIKDASMEN, Dirjen GTK, Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, dan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kedua adalah PMO tingkat daerah atau disebut juga dengan PMO UPT yang terdiri dari BBPMP, BBGP, Dinas Pendidikan, dan Balai Bahasa. Kemudian terdapat PMO level satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan komite pembelajaran. Pengawas sekolah masuk ke dalam PMO tingkat dan daerah dan tingkat sekolah juga. Adapun peran Fasilitator Sekolah Penggerak sebagai upaya dalam mempercepat pengimplementasian Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak. Sekolah melaporkan kegiatan terkait implementasi Program Sekolah Penggerak setiap minggunya pada hari Rabu dengan PMO Daerah. Adapun setiap bulannya PMO daerah melakukan rapat bulanan untuk koordinasi dan pembahasan-pembahasan mengenai Program Sekolah Penggerak. Prosedur pelaksanaan Program Sekolah Penggerak ini terdapat pada Kepmendikbud No. 371/M/2021 dan aturan, panduan, serta publikasi lainnya dari Kemdikbudristek terkait Program Sekolah Penggerak. Dalam implementasinya, pelaksana kebijakan baik dari PMO level pusat, daerah, dan satuan pendidikan sudah memahami dan melaksanakan

Program Sekolah Penggerak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka implikasi dari implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung memberikan gambaran mengenai kesesuaian terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan aturan atau panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak dari tahun 2021 untuk angkatan pertama sudah menggambarkan keseriusan pelaksana kebijakan dalam mensosialisasikan seluruh informasi yang dibutuhkan baik dari informasi yang diberikan BBPMP, dinas pendidikan, dan sosialisasi untuk sekolah. Komunikasi ini berimplikasi pada pemahaman pelaksana kebijakan dalam memahami isi dari kebijakan sehingga komunikasi yang disampaikan pemerintah pusat harus jelas dan konsisten. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan Program Sekolah Penggerak dapat dijadikan pertimbangan serta perhatian khusus untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Kualifikasi SDM berimplikasi pada kinerja SDM tersebut, kualifikasi yang telah ditentukan melalui seleksi bagi kepala sekolah penggerak dan FSP diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dari Program Sekolah Penggerak dengan mempermudah guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya, dan pengimbasan pada sekolah untuk intervensi-intervensi Program Sekolah Penggerak. Sedangkan sumber daya lainnya seperti informasi, pendanaan, dan fasilitas berimplikasi pada kelancaran Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan sekolah sehingga diperlukan kemudahan akses informasi, pendanaan yang cukup, dan fasilitas yang memadai bagi sekolah agar dapat mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak secara optimal.

Respon yang baik dan positif serta adanya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak berimplikasi juga pada kinerja pelaksana kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar, maka penempatan SDM harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Komitmen

pelaksana kebijakan juga dapat menjadi faktor pendukung bagi pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan dari Program Sekolah Penggerak.

Adanya SOP yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan Program Sekolah Penggerak berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan kebijakan karena kesesuaian tindakan pelaksana kebijakan dengan aturan atau panduan yang ada sangat membantu pencapaian tujuan dari kebijakan Program Sekolah Penggerak terutama dalam melaksanakan 5 intervensi Program Sekolah Penggerak.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Komunikasi

Dapat mempertahankan komunikasi yang telah dibangun BBPMP, Dinas Pendidikan, dan sekolah dengan berbagai media komunikasi baik secara daring maupun luring dan memperluas jangkauan sosialisasi Program Sekolah Penggerak agar semua sekolah di Indonesia mengetahui serta benar-benar memahami maksud dan tujuan dari Program Sekolah Penggerak, dan pemerintah tetap konsisten dalam menyampaikannya

5.3.2 Sumber Daya

Sekolah dapat mempertimbangkan agar waktu pelatihan dan pembinaan guru tidak mengganggu waktu KBM di kelas, pemerintah memastikan bahwa informasi pada *website* Program Sekolah Penggerak adalah informasi terbaru dan memastikan layanan *helpdesk* terus berjalan agar memberikan informasi yang dibutuhkan baik bagi sekolah maupun dinas pendidikan, dan adanya bantuan dari pemerintah daerah bagi sekolah penggerak yang sudah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak selama tiga tahun ajaran agar mendukung sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru terutama dalam hal Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

5.3.3 Disposisi

BBPMP, dinas pendidikan, dan sekolah dapat mempertahankan sikap positifnya terhadap kebijakan Program Sekolah Penggerak dan terus melaksanakan komitmennya dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

5.3.4 Struktur Birokrasi

PMO tingkat pusat, daerah, dan sekolah dapat mempertahankan kerja sama yang selama ini dibangun untuk pengimplementasian Program Sekolah Penggerak.

5.3.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai kebijakan Program Sekolah Penggerak dapat meneliti kebijakan Program Sekolah Penggerak dengan cakupan wilayah yang lebih luas lagi, menambah subjek penelitian dari BBGP untuk memperkaya informasi terkait fasilitator sekolah penggerak, dan dapat meneliti sekolah penggerak dari semua angkatan yang ada untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif lagi.